



SNIA[®]

SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT
WHAT'S DRIVING CHANGE
 to Stay Ahead of The Curve
 for Internal Auditors
 in The Coming Years ?

3-4 DESEMBER 2025 | THE STONES HOTEL, BALI



Logos of partner organizations displayed in a white rounded rectangle:

- PLN mobile
- PLN
- PERTAMINA
- mandiri



AUDITING POLICY IMPACT : STRENGTHENING ACCOUNTABILITY IN THE PUBLIC SECTOR



**Dr. Agung F. Sampurna, CSFA, CFrA, CGCAE,
QGIA, CACP**

**Seminar Nasional Internal Audit- YPIA
Bali, 4 Desember 2025**

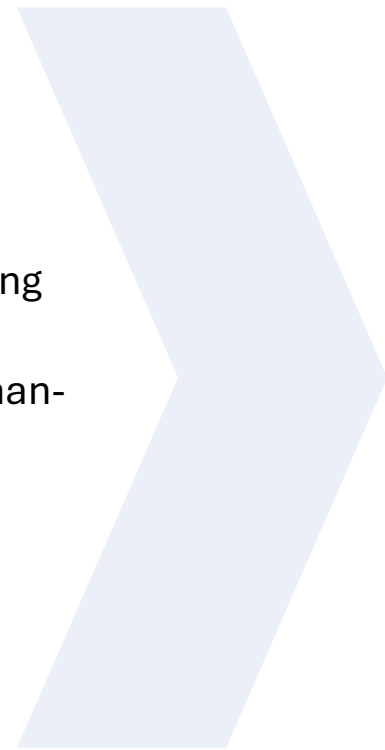


1

**AUDIT AND
AUDIT POLICY**



Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.



Pemeriksaan (audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004

An **audit policy** is a set of formal rules and procedures that define how the audit process is carried out to monitor and evaluate the operations, internal controls, and compliance with relevant laws, regulations, and internal guidelines of the audited entity.

Kebijakan audit adalah seperangkat aturan dan prosedur formal yang mendefinisikan bagaimana proses audit dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi operasi, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan pedoman internal yang relevan dari entitas yang diaudit.

ASPEK	AUDIT	AUDIT POLICY (KEBIJAKAN AUDIT)
Fungsi	Melakukan pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil	Menetapkan arah, prinsip, dan standar pelaksanaan audit
Tujuan	Memberikan <i>assurance</i> , temuan dan rekomendasi	Menjamin konsistensi, independensi, dan efektivitas audit
Tingkat operasional	Taktis / Eksekusi di lapangan	Strategis / Kebijakan dan tata kelola
Pelaksana	Auditor internal atau eksternal	Manajemen puncak / Komite Audit
Hasil	Laporan audit (temuan & rekomendasi)	Dokumen kebijakan dan prosedur audit



2

PUBLIC POLICY AND PUBLIC SECTOR AUDIT POLICY

**How to define
audit policy in
the public
sector ?**





DEFINITION

Definisi

a set of actions, decisions, and plans taken by governments to address public problems, serve the interests of public and to achieve public goals.



PURPOSE

Tujuan

to create order, security, and promote public welfare as well as respond to other public issues that cannot be addressed by the private sector or the community.



BENTUK

Definisi

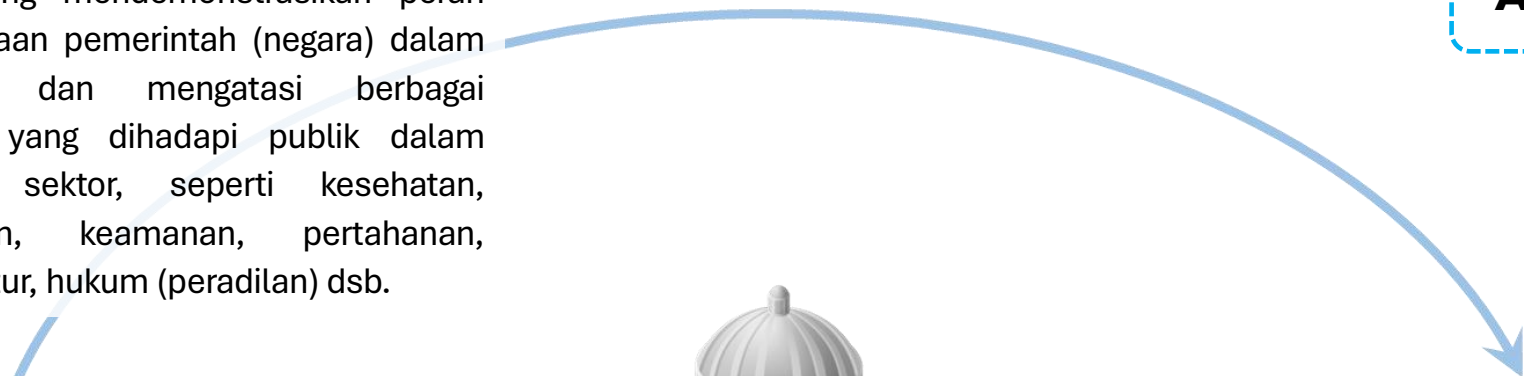
laws, regulations, programs, and initiatives that are created to manage issues like civil rights, budget and taxes, and the welfare of people.

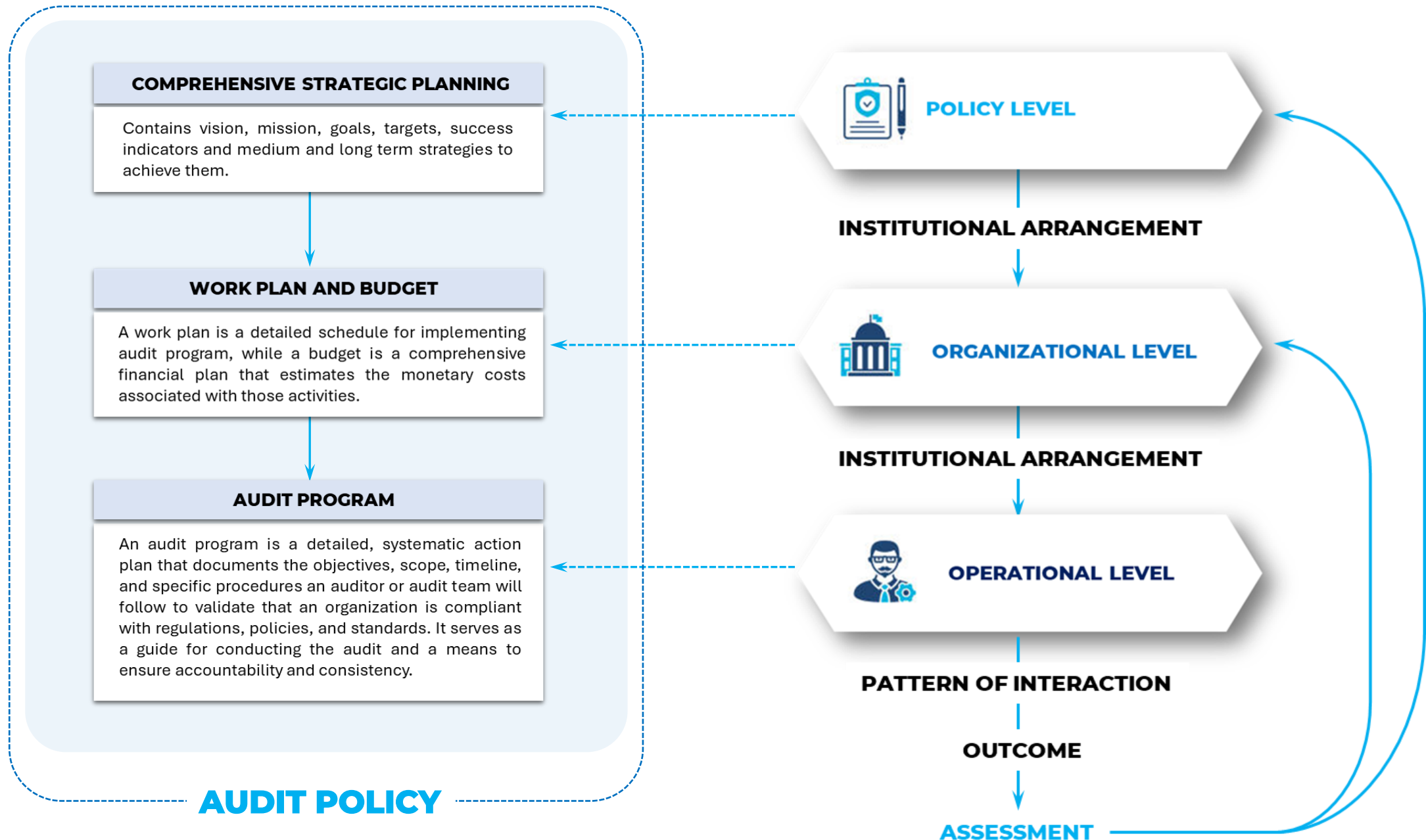


Kebijakan sektoral adalah kebijakan publik yang mendemonstrasikan peran kelembagaan pemerintah (negara) dalam melayani dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi publik dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, pertahanan, infrastruktur, hukum (peradilan) dsb.



Kebijakan tata kelola adalah kebijakan yang mengatur mekanisme internal pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan aparatur yang melayani publik (ASN, pegawai BI, BUMN, dsb) dan sistem pengawasan.







3

DAMPAK KEBIJAKAN AUDIT SEKTOR PUBLIK



“ Dampak kebijakan audit (*policy audit impact*) adalah hasil atau pengaruh nyata dari penerapan kebijakan audit terhadap pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) lembaga publik atas pengelolaan sumberdaya publik dan kinerja yang dihasilkannya. ”



**DR. SETYANTO P. SANTOSA, SE, MA, AK, CA,
QIA**

CHAIRMAN
INTERNAL AUDIT EDUCATION FOUNDATION
(YAYASAN PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT)

AUDIT POLICY, AUDIT PROCESS AND AUDIT RESULT



Audit Policy
(Kebijakan Audit)

1. Renstra
2. RKP/RKA
3. **P2 (Program Audit)**
4. Kompetensi Tim



Audit Process
(Proses Audit)

1. Integritas
2. **Konsistensi**
3. Ketersediaan Data



Audit Result
(Hasil Audit)

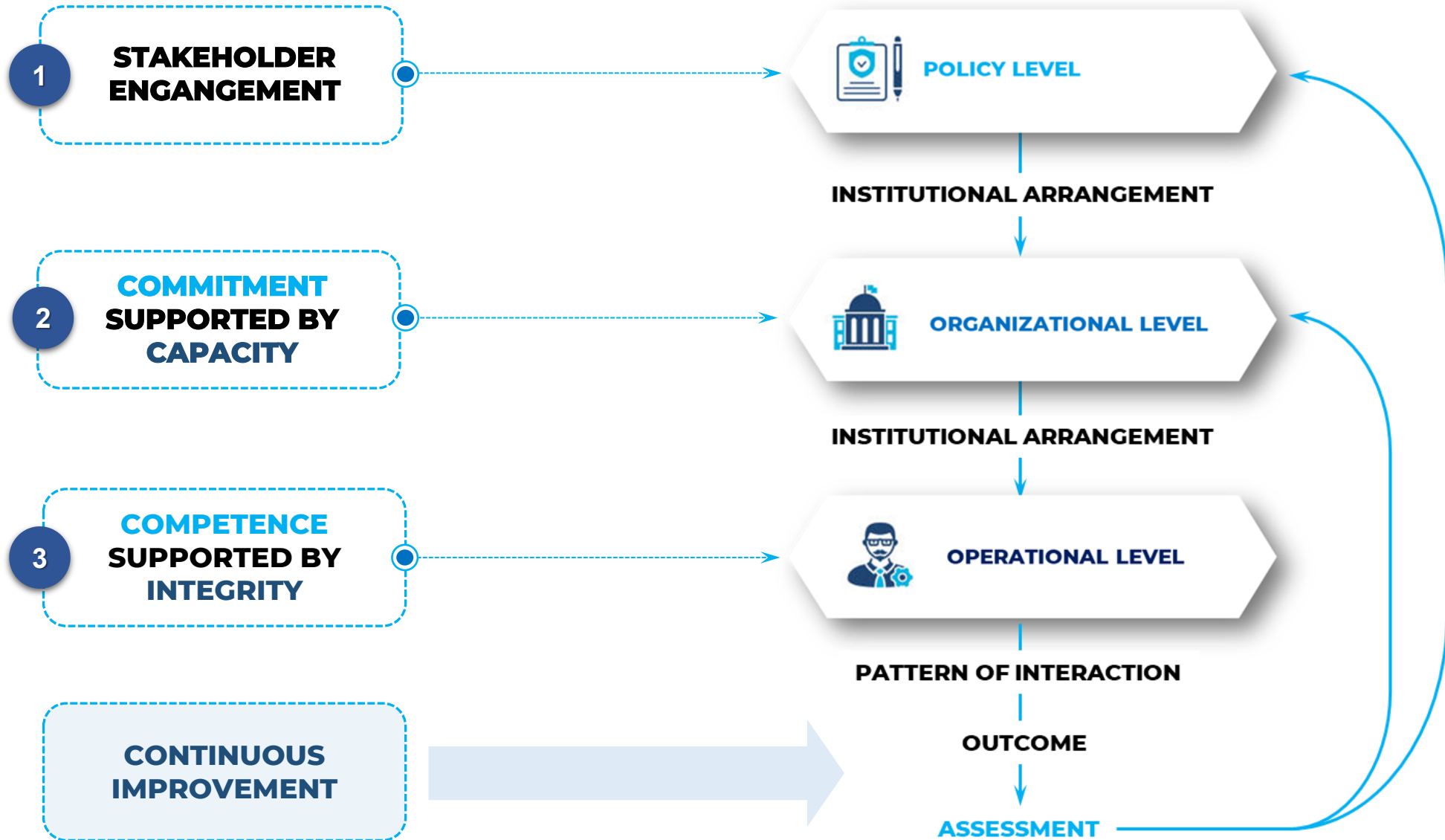
1. LHP/LHA
2. Perbaikan Tata Kelola
3. Peningkatan Kinerja

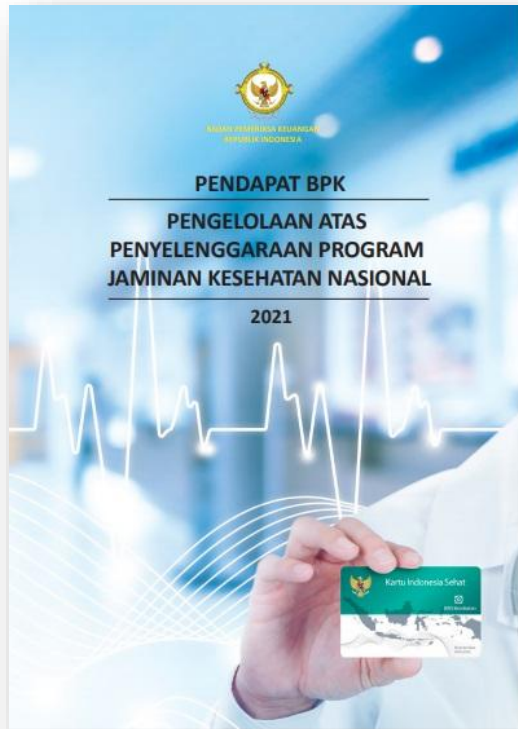


DAMPAK **AUDIT** VS DAMPAK **KEBIJAKAN AUDIT**

ASPEK	AUDIT (PEMERIKSAAN)	KEBIJAKAN AUDIT (AUDIT POLICY)
Sifat Dampak	Langsung dan operasional	Tidak langsung dan strategis
Waktu Dampak	Jangka pendek (setelah pemeriksaan)	Jangka panjang (berkelanjutan)
Fokus Utama	Perbaikan praktik dan kinerja	Penguatan sistem dan tata kelola
Arah Dampak	Korektif – memperbaiki kesalahan dan kelemahan	Preventif – mencegah penyimpangan sistemik
Aktor Utama	Auditor internal/eksternal	Pembuat kebijakan dan pimpinan lembaga
Output	Laporan hasil audit (temuan, rekomendasi)	Dokumen kebijakan dan pedoman audit

KEBIJAKAN **AUDIT** DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS





PENDAPAT BPK ATAS PROGRAM JKN ASPEK PENDANAAN

BPK telah melakukan pemeriksaan selama periode 2015-2019, namun permasalahan yang ditemukan terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk itu, BPK memberikan pendapat terkait pengelolaan penyelenggaraan Program JKN sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pendapat BPK ini memuat hasil kajian atas aspek kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan yang memengaruhi pengelolaan penyelenggaraan Program JKN yang belum optimal.

BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



PENDAPAT BPK

Mewujudkan kesinambungan kemampuan keuangan DJS Kesehatan sehingga meminimalisir defisit keuangan, yaitu dengan:

- A** Menyusun mekanisme pengumpulan iuran yang efektif untuk menjamin kolektibilitas dan validitas besaran iuran terutama dari segmen PPU dan PBPJU.
- B** Melakukan reformasi besaran pembayaran kapitasi kepada FKTP dengan mengacu pada standar besaran tarif dan capaian indikator kinerja yang merujuk pada kualitas pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan, kelengkapan sumber daya kesehatan, serta kapasitas dan komitmen dalam pencegahan kecurangan.
- C** Melakukan reformasi peran FKTP yang merupakan garda terdepan dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia, melalui optimalisasi dana bidang kesehatan dari APBN/APBD di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dalam rangka meningkatkan upaya promotif, preventif, dan pola rujukan layanan kesehatan yang ideal.
- D** Melakukan penyempurnaan aplikasi verifikasi klaim pelayanan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan risiko kecurangan yang mungkin terjadi.
- E** Mengatasi defisit keuangan DJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan fiskal.
- F** Mendorong kolaborasi pendanaan dengan pemerintah daerah sehingga memberi ruang bagi APBD untuk berkontribusi dalam program JKN.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

Defisit dalam pendanaan penyelenggaraan Program JKN terus terjadi meski pemerintah telah memberikan bantuan keuangan kepada DJS Kesehatan, karena:



BPJS Kesehatan belum memiliki mekanisme pengumpulan iuran yang efektif terutama untuk menjamin kolektibilitas dan validitas besaran iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU).



Penetapan dana kapitasi belum memperhitungkan norma kapitasi berupa sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).



Pelayanan kesehatan yang semestinya dapat dituntaskan pada FKTP namun dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta pelayanan kesehatan promotif dan preventif pada FKTP belum optimal.



Aplikasi verifikasi klaim pelayanan kesehatan pada BPJS Kesehatan masih perlu dilakukan perbaikan, karena belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan beban pelayanan kesehatan.



Pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan defisit keuangan DJS Kesehatan sehingga berisiko mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.



Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pendanaan Program JKN di luar iuran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) daerah belum optimal.



PENDAPAT BPK ATAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Aspek Regulasi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia

Salah satu hal mendasar dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus) adalah pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Bentuk konkrit pemberdayaan OAP yaitu dengan memberikan Dana Otsus yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalan dari masyarakat di provinsi lainnya.

BPK telah melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Otsus, namun permasalahan yang ditemukan belum terselesaikan hingga saat ini dan berdampak pada belum tercapainya tujuan Otsus Papua. Selain itu, pemberian Dana Otsus periode 2001-2021 akan berakhir pada tahun 2021 ini. Untuk itu, BPK memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan dan perbaikan Program Otsus Papua. Pendapat BPK memuat 2 hal pokok yaitu keberlanjutan Program Otsus Papua dan pengelolaan Dana Otsus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

REGULASI

Pemerintah tidak menyusun regulasi secara lengkap, yaitu:

- 1 UU Otsus tidak mengamankan penyusunan grand design pembangunan Papua dalam rangka Otsus periode 2001-2021 sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya.
- 2 UU Otsus tidak mengatur pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat segera diatasi dalam rangka mewujudkan tujuan Program Otsus Papua.
- 3 Belum seluruh Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan dalam amanat UU Otsus ditetapkan.

KELEMBAGAAN

Majelis Rakyat Papua memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat dilengkapi dengan instrumen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan antara lain dengan membentuk Komite Pengawas untuk membantu tugas pengawasan.

SUMBER DAYA MANUSIA

- 1 Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya mengelola pemberian beasiswa kepada masyarakat Papua dan belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat Papua untuk peningkatan kualitas dan daya saing sesuai dengan tujuan Program Otsus.
- 2 Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum sepenuhnya memadai antara lain berdampak pada perencanaan dan alokasi Dana Otsus belum selaras dengan UU Otsus, pelaksanaan dan tanggungjawab yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.

PENDAPAT BPK

Memperbaiki pengelolaan Program Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dengan:

REGULASI

- 1 Menyusun dan menetapkan grand design pembangunan Papua dalam rangka Otsus dengan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat untuk memberikan arah dan strategi Otsus Papua serta dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. Grand design tersebut juga dilengkapi dengan indikator dan target yang ingin dicapai dan penyusunannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua melalui proses need assesment secara menyeluruh.
- 2 Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk penetapan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa laporan evaluasi tersebut.
- 3 Mendorong penyusunan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.

KELEMBAGAAN

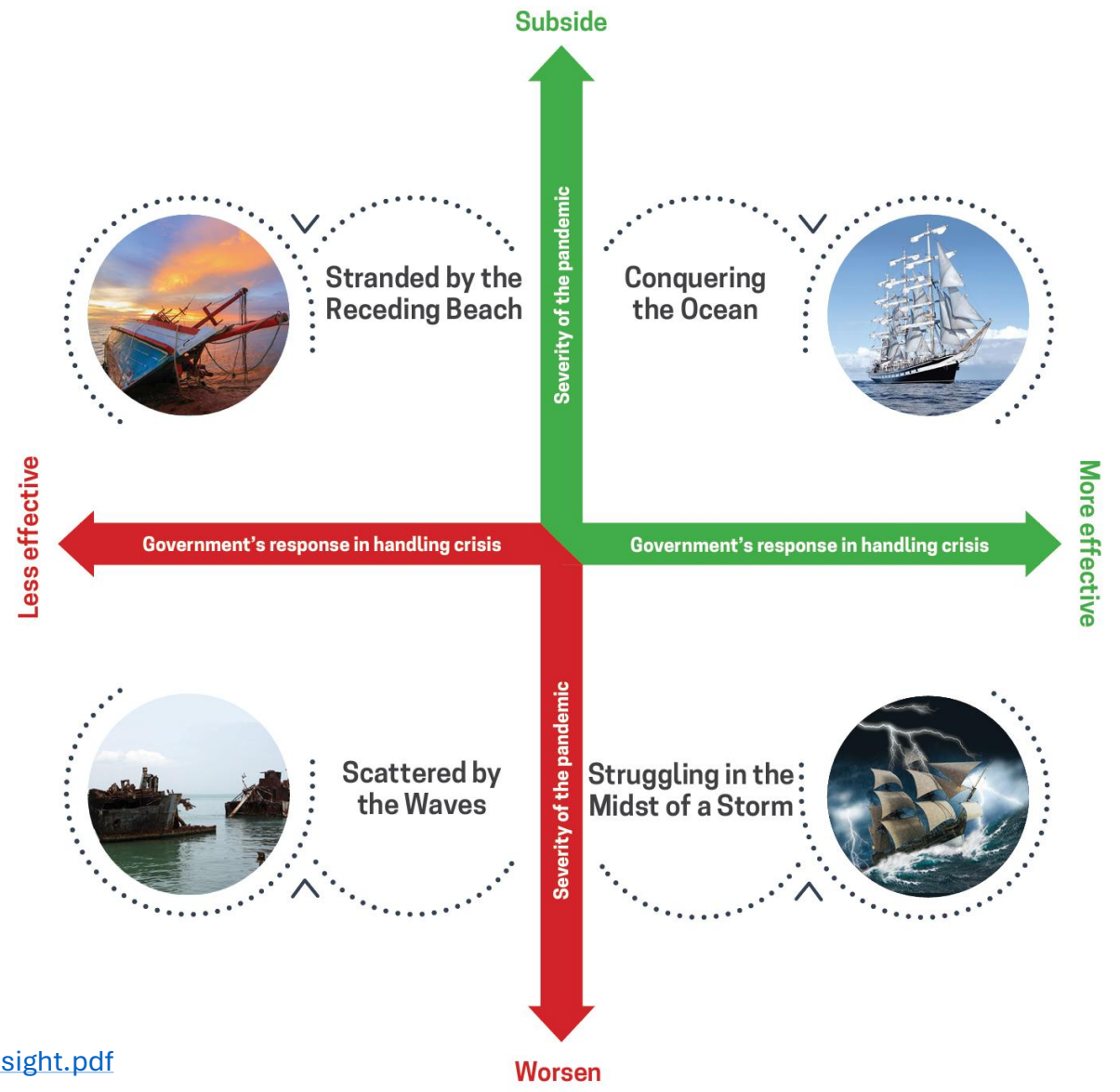
Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

SUMBER DAYA MANUSIA

- 1 Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan:
 - a) Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan, dan secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain pendidikan dan kesehatan.
 - b) Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga terjadi transfer of knowledge dan masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur sehingga meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
- 2 Bersama-sama dengan Pemrov Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada Biro Otsus Provinsi Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan Program Otsus secara optimal.



Map of Scenario Framework with Four Condition that May Happen in the Future



Indonesia's Future after the COVID-19 Pandemic: The Description of Indonesia's future in various sectors i.e. health, economy, finance, social, politics, education, environment, and technology.	
Scenario 1: Conquering the Ocean More effective government response and pandemic subsiding	
Health	<ul style="list-style-type: none"> The number of health workers and health facilities in rural and suburban areas has increased due to the intensive collaboration between the National Research and Innovation Agency (BRIN), the Ministry of Health, universities, and nursing schools. The number of Indonesian people who travel abroad to receive medical treatment has decreased due to the better health services and facilities in the country.
Economy	<ul style="list-style-type: none"> Affordable basic necessities, which sustain people's purchasing power. The economy strengthens as infrastructure is developed, conducive arrangements are strengthened, and trust from investors is built.
Finance	<ul style="list-style-type: none"> Higher state revenues through the new tax scheme and optimalization of non-tax revenue from oil and gas (PNBP MIGAS) have kept the APBN deficit low. Tax revenue has increased due to reduced compliance costs, a more conducive investment climate, and an increase in taxpayer compliance.
Social	<ul style="list-style-type: none"> Society tends to be more tolerant of others, cooperation among different type of societies increases, social situation improves, crime rates significantly reduces. Public awareness about a healthy lifestyle is increasing, which can be seen from the rise of community-based sport activities.
Politics	<ul style="list-style-type: none"> The new government from the 2024 election's visions has been successfully implemented to policies and regulations that are in line with the needs of the people in both urban and regional areas. Indonesia's prestige and reputation in various international fora are rising as a result of active diplomacy of national leaders in the midst of global uncertainties.
Education	<ul style="list-style-type: none"> Maintaining a healthy lifestyle is introduced in the new curriculum for primary to secondary school. Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR) is implemented by many academic institutions, training centers, and talent pool to evaluate skills and knowledge obtained through non-formal education outside of class in order to identify competencies based on a set of standard and certain learning results.
Environment	<ul style="list-style-type: none"> Hazardous waste treatment companies are becoming popular, and many start-ups are working on medical waste. The target to reach 23% renewable energy mix (EBT) has been achieved due to the widespread use of solar energy in the industrial sector and biofuels for transportation.
Technology	<ul style="list-style-type: none"> One Data Indonesia Program and an integrated and comprehensive Electronic Based Government System (SPBE) are established which successfully improve the quality of public services. Cyber-crime regulations related to personal data protection to protect the public from cyber-crime are available and implemented properly, which reduce cases of cyber-crime drastically. Internet community activists are empowered and supported by the government to accelerate the installation of internet infrastructure in rural and underdeveloped, frontier, and outermost areas, supporting the increase in digital literacy and digital economic activities that have a direct impact on increasing people's incomes.

Indonesia's Future after the COVID-19 Pandemic: The Description of Indonesia's future in various sectors i.e. health, economy, finance, social, politics, education, environment, and technology.	
Scenario 2: Struggling in the Midst of a Storm More effective government response and pandemic worsening	
Health	<ul style="list-style-type: none"> Reforms to improve the national health system, including its financing, succeed in increasing the availability and access to health facilities, health workers, medical equipments and medicines, enable patients exposed to the virus variant to use JKN to obtain treatment and basic health services. People who are dissatisfied with modern medicine and hospitals turn to traditional medicine due to the confusion and abundance of misleading information about the health effects of vaccines.
Economy	<ul style="list-style-type: none"> Affordable basic needs, assured supply and distribution of goods and services New investment in sectors such as pharmacy, hospitals, and medical equipment are increasing
Finance	<ul style="list-style-type: none"> The government implements schemes and incentives to encourage financial institutions and banks to improve financial literacy, and digitize micro, small and medium-sized enterprises (MSME) services in the regions to boost tax revenue. The Financial Services Authority (OJK) has adequate regulations and supervision schemes for investment instruments in the digital economy.
Social	<ul style="list-style-type: none"> Communities and families living in urban areas face a greater challenge in dealing with the implementation of civil emergency than those living in rural areas. Social solidarity efforts from volunteers and the support of valid and updated integrated social welfare data (DTKS) make the distribution of social assistance precisely and timely received by targeted people.
Politics	<ul style="list-style-type: none"> Political parties that managed to bond with the public receive an overwhelming amount of support in regional areas after the 2024 elections. In some regions, a number of once dominant political parties loose supports from the public. The government formed as a result of the 2024 elections is working hard to convince the public that Indonesia is moving in a promising direction and the pandemic will be brought under control in the not too distant future.
Education	<ul style="list-style-type: none"> Distance learning (PJJ) remains a prevalent government policy. PJJ adaptation leads to new creativities and initiatives in the community and academic institutions.
Environment	<ul style="list-style-type: none"> Environmental activists advocate to continue environmentally conscious behavior by collaborating with influencers on social media and television, due to the increasing number of medical waste and pollutants as a result of the worsening pandemic. The trend of hydroponics to grow crops on limited land is increasing in urban areas, as mobility remains limited during the implementation of civil emergency.
Technology	<ul style="list-style-type: none"> One Data Indonesia Program and an integrated and comprehensive Electronic Based Government System (SPBE) are established, supporting smooth implementation of public services. Regulations on personal data protection succeed in mitigating cyber-crimes. Society's success in adapting to digital technology has resulted in an accelerated transformation in the e-government, e-banking, e-commerce, telemedicine, and distance learning sectors.

Indonesia's Future after the COVID-19 Pandemic: The Description of Indonesia's future in various sectors, i.e. health, economy, finance, social, politics, education, environment, and technology.	
Scenario 3: Scattered by the Waves Less effective government response and pandemic worsening	
Health	<ul style="list-style-type: none"> Available vaccines are ineffective against new variants; health facilities, health workers, medical equipment, and medicines are limited and unevenly distributed. Many COVID-19 patients cannot have medical treatment at hospitals and died at home due to national health system falls. In addition to the emergence of new variants, diseases that had previously been prevented such as polio and diphtheria, have re-emerged.
Economy	<ul style="list-style-type: none"> A sharp increase in the prices of basic necessities to an uncontrolled level that has become unaffordable by the lower-income class due to the disruption of production and distribution. Domestic consumption is stagnant as the lower middle class does not receive the government's economic stimulus.
Finance	<ul style="list-style-type: none"> The APBN deficit is above the level permitted by law; suboptimal tax revenues; poor government spending; and people are requesting delays or unable to pay taxes due to severe economic difficulties. Many small banks have collapsed due to high levels of non-performing loans (NPLs).
Social	<ul style="list-style-type: none"> Increased poverty and social disparities increased crime rates increases; increased consumption of liquor and drugs; widespread looting accompanied with uncontrolled demonstrations and marches. The distribution of social assistance is inaccurate, untimely, and not well-targeted, because the process is not supported by a valid and updated integrated social welfare data (DTKS).
Politics	<ul style="list-style-type: none"> Confidence in the new government elected in the 2024 election decreases because it is considered to be failing in overcoming the pandemic and in economic, financial, and social recovery. Political polarization among the public is widespread.
Education	<ul style="list-style-type: none"> In many areas, distance learning (PJJ) has stalled or is not working effectively; the sustainability of educational institutions at the primary level in a number of areas is threatened due to the high mortality rate of teachers. Education subsidies from the government are not well absorbed to the extent that middle and high school students have to dropout permanently due to the family's economy.
Environment	<ul style="list-style-type: none"> A significant increase in the volume of medical waste; poor handling of waste from hazardous materials and toxic waste, which increases the threat to environmental health Hazardous waste pollutes water and develops into a new threat to communities that draw their drinking water, bathing, and washing from their own wells
Technology	<ul style="list-style-type: none"> An integrated and comprehensive Electronic-Based Government System (SPBE) and One Data Indonesia Program are not yet established. As such, public services are not optimal and regulations related to personal data protection to protect the public from cyber-crime are not implemented causing a surge in cases of cyber-crime. Communities in rural and remote areas find it difficult to benefit from the digital economy due to a lack of access to digital infrastructure, thereby widening the digital divide.

Indonesia's Future after the COVID-19 Pandemic: The Description of Indonesia's future in various sectors, i.e. health, economy, finance, social, politics, education, environment, and technology.	
Scenario 4: Stranded by the Receding Beach Less effective government response and pandemic subsiding	
Health	<ul style="list-style-type: none"> Health reforms that include the provision and distribution of health facilities, health workers, medical equipment, and medicines have not been implemented effectively; the health condition of poor and vulnerable communities is worsening due to the decrease in health service coverage and quality. Many hospitals are inoperable and need to merge with other hospitals to remain afloat over unpaid hospital bills by the JKN.
Economy	<ul style="list-style-type: none"> The government loses its ability to control the prices of basic necessities due to poor planning and coordination among ministries and agencies dealing with food; the prices of ordinary and medium quality rice often fluctuate due to supply issues. Lack of confidence from investors, huge obligations to pay principal and interest debts, and dependent on imports to provide vaccines, drugs, and medical equipment have increased the risk of exchange rate volatility.
Finance	<ul style="list-style-type: none"> Unmet tax revenue target; postponed financing of strategic programs; and state budget cuts. The Fiscal Consolidation Plan is not achieved; the government needs to continue its Reopening, Recovery, and Reform Policy.
Social	<ul style="list-style-type: none"> Unemployment in rural areas is spreading, and the number of middle and high school dropouts is increasing rapidly. This eventually led to a surge in criminal cases and delinquency among teenagers. Social and cultural activities are slowly recovering; returning to school and working increase mobility.
Politics	<ul style="list-style-type: none"> Public disappointment with the government increases due to the slow recovery of the national economy. There is an emergence of reform movement within political parties to encourage internal democratic practices and strengthen party identity.
Education	<ul style="list-style-type: none"> Schools in big cities are undertaking hybrid methods of learning, combining face-to-face learning (PTM) with distance learning (PJJ). Schools in the countryside, especially in disadvantaged, frontier, and outermost areas, are unable to carry out the hybrid model, as they are constrained by an inadequate digital infrastructure. Strong urge on local and central governments to reform their curriculum and post-pandemic learning methods.
Environment	<ul style="list-style-type: none"> There is increasing pressure from the public towards the government to have a more sufficient grand master plan in hazardous and toxic waste management. The sale and auction of carbon credits as an effort to suppress the increase in global temperature does not run effectively due to bargaining, bribery, and fraud.
Technology	<ul style="list-style-type: none"> Data privacy regulations to protect citizens from cyber-crime are yet to be established; there is an increase in cyber-crime cases. Data leaks, electronic eavesdropping, and data falsification are rampant, limiting the growth of digital transactions which prevents the government from achieving their targets for digital transformation.



4

MASALAH DAN TANTANGAN **AUDIT **SEKTOR PUBLIK****

1


- a. Political influence and audit independence
- b. Regulatory fragmentation
- c. Outdated standards
- d. Policy ambiguity

2

- a. Misaligned structure
- b. Silo mentality
- c. IT without risk assessment
- d. Resistance to change
- e. "Autopilot" phenomenon

3

- a. High workload and time constraints
- b. Inconsistent application of risk assessment
- d. Insubordination or contempt of authority
- e. Substandard audit report

 **POLICY LEVEL**

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

 **ORGANIZATIONAL LEVEL**

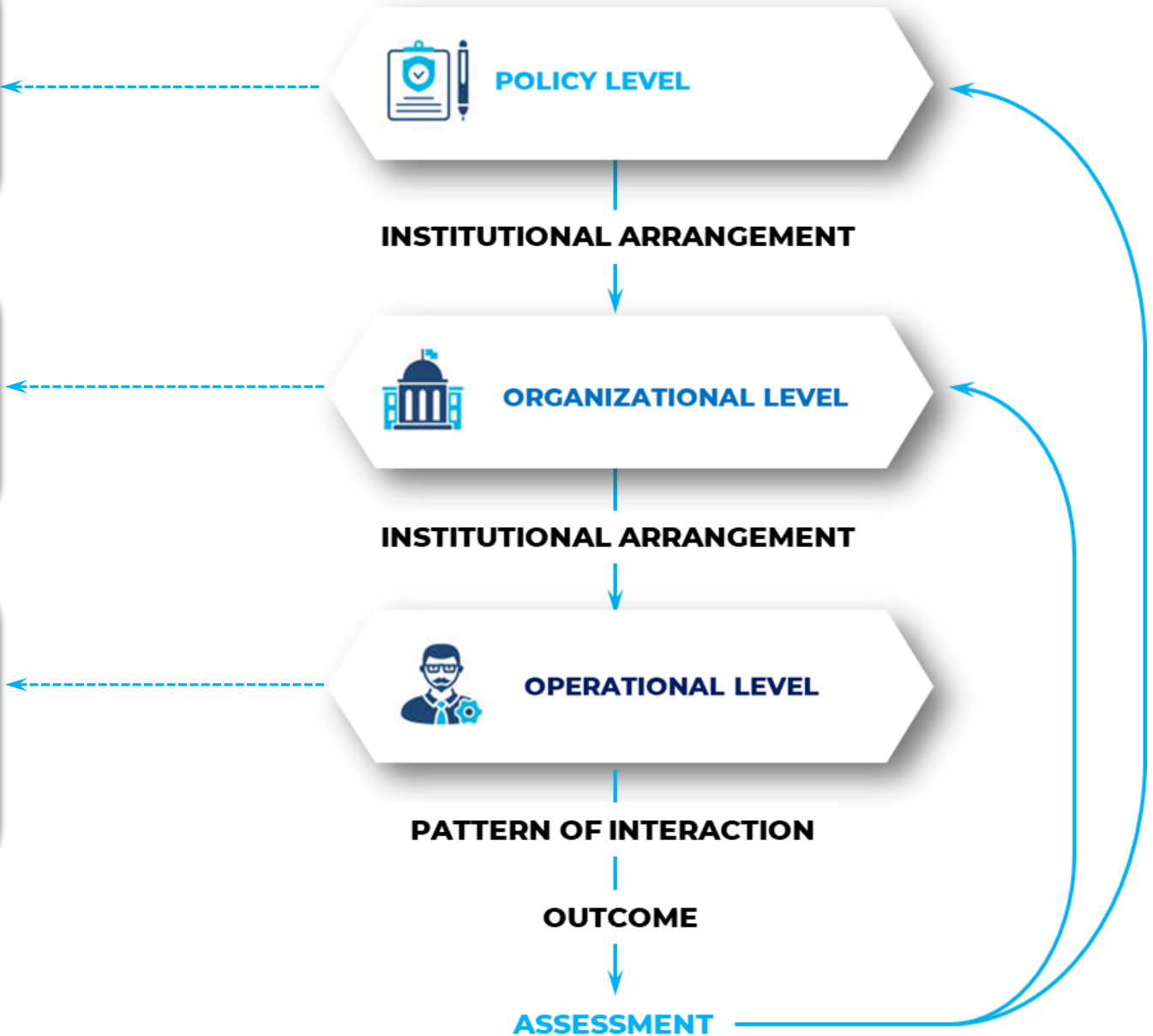
INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

 **OPERATIONAL LEVEL**

PATTERN OF INTERACTION

OUTCOME

ASSESSMENT



1

Geopolitical Tensions and Global Economic Uncertainty



a

Fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok

b

Belanja darurat kurang terawasi

c

Risiko otoritarianisme dan penutupan informasi

Audit dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan informasi, memitigasi berbagai risiko dan memperkuat resiliensi tata kelola dalam menghadapi situasi luar biasa

TANTANGAN

2

The Post-Truth Fog

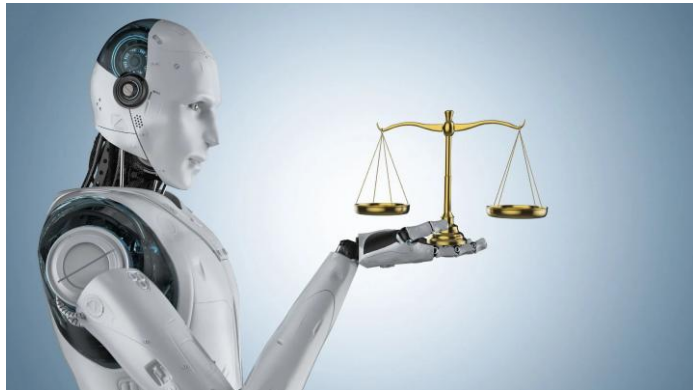


**Fakta objektif
dikalahkan opini
emosional**

Audit dibutuhkan
untuk menjamin
kredibilitas dan
validitas data
(khususnya terkait
tata kelola publik)

TANTANGAN

Who Audits the Algorithm ?



AI untuk audit data (*fraud detection, anomaly*), AI juga berisiko menghasilkan bias dan informasi yang tidak akurat

Model AI tidak netral secara politik maupun bebas dari bias. Lebih penting lagi, model tersebut bahkan mungkin mustahil untuk tidak bias.

Kebijakan audit tidak saja diarahkan untuk menguji data, tetapi juga *coding* (sistem/aplikasi/program) yang menghasilkan data tersebut.

ISO/IEC 42001:2023 (Standar tata kelola AI)



4

The urgency of a sustainable future



a

**Green budgeting,
subsidi energi,
green bonds**

b

**Implementasi SDGs
dan Net Zero Target**

c

**Greenwashing dan
pemborosan proyek
lingkungan**

Kebijakan audit perlu diarahkan tidak saja dalam konteks *assurance of financial accountability*, tetapi juga *assurance of sustainability accountability*

Standar Pelaporan



Standar Pemeriksaan (Audit)

AA1000

GUIDANCE ON
ASSURING GHG
EMISSIONS WITH
AA1000AS v3

2024

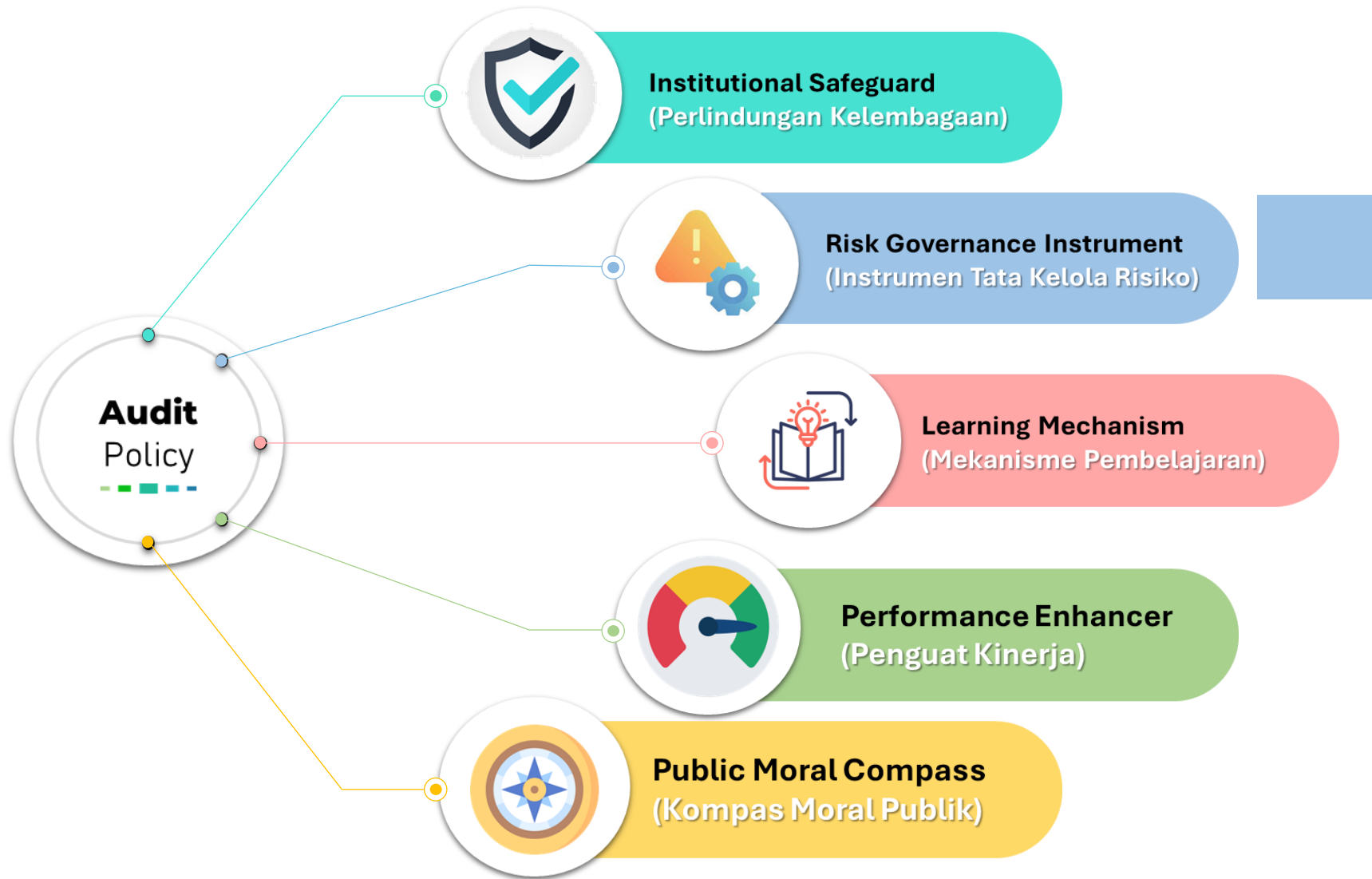


TANTANGAN



5

**PENUTUP : BEYOND
ACCOUNTABILITY**



1

Audit sebagai *Institutional Safeguard* dan *Trust Builder*

Audit menjadi mekanisme penjaga institusi yang mencegah erosi nilai dan struktur pemerintahan.

1. Memastikan program publik tidak tergelincir dari mandat aslinya.
2. Melindungi organisasi dari “drift”, misalnya perubahan tajam tanpa kontrol.
3. Menjaga otoritas institusi agar tetap legitimate di mata publik.
4. Publik menilai bahwa sumber daya negara diawasi secara ketat.
5. Kepercayaan meningkat ketika audit mampu mengungkap dan memperbaiki kelemahan sistem.
6. Kepercayaan publik adalah modal sosial penting dalam demokrasi.

Audit berperan sebagai “rem institusional” (*institutional brake*) untuk menjaga stabilitas dan sekaligus salah satu pilar legitimasi pemerintahan.

2

Audit sebagai *Risk Government Instrument*

Audit mengisi celah yang tidak tercakup oleh regulasi atau SOP dengan memberikan **penilaian independen atas risiko** dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Mengidentifikasi risiko sistemik yang tidak terlihat oleh unit operasional.
2. Mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih matang.
3. Menjadi mekanisme kontrol dinamis saat perubahan teknologi, politik, atau kebijakan.

Audit memperkuat daya tahan kelembagaan (*institutional resilience*).

3

Audit sebagai *Learning Mechanism*

Audit bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga instrumen **pembelajaran organisasi**.

1. Menghasilkan *lessons learned* untuk perbaikan kebijakan dan prosedur.
2. Memfasilitasi *feedback loop* antara tingkat kebijakan, institusi, dan operasional.
3. Mendorong organisasi publik menjadi *learning organization*.

Audit menciptakan budaya **perbaikan berkelanjutan** (continuous improvement)

4

Audit sebagai *Performance Enhancer*

Audit mendorong tata kelola untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

1. Menilai apakah program pemerintah (negara) menghasilkan *output, outcomes dan impact* yang diharapkan.
2. Mendeteksi pemborosan (waste), inefisiensi, dan duplicative practices.
3. Menjadi dasar untuk reformasi birokrasi dan optimalisasi anggaran.

Audit memperkuat **Value for Money**

Audit sebagai *Public Moral Compass*

Audit sektor publik berfungsi sebagai **kompas moral** yang memberikan arah etika bagi pengelolaan sumber daya negara

1. Menegaskan nilai-nilai **integritas, kejujuran, dan kepatuhan hukum.**
2. Membentuk harapan publik tentang bagaimana pejabat publik *seharusnya* bertindak.
3. Memberikan sinyal normatif bahwa perilaku menyimpang (fraud, korupsi, penyalahgunaan wewenang) tidak dapat ditoleransi.

Kebijakan audit tidak saja ditujukan untuk mengidentifikasi menemukan kesalahan atau masalah dalam tata kelola, tetapi juga **membentuk standar moral tata kelola publik**



YAYASAN
PENDIDIKAN
INTERNAL
AUDIT

thank
you